

TANTANGAN DAN PELUANG PENDIDIKAN ISLAM DI PESANTREN PADA ERA DISRUPSI

Khotimah Suryani

Universitas Islam Darul Ulum, East Java, Indonesia

khotimah@unisda.ac.id

ABSTRACT:

General Education is considered to have not been able to equip its graduates to avoid immoral behavior. The importance of the internalization of values in an education. Islamic boarding schools are one of the educational institutions that are able to internalize the values of Islamic teachings as provisions in the formation of the nation's personality. The younger generation who have superior personalities can avoid immoral behavior.

The phenomenological approach in this study is aimed at portraying the existence of disruption as a phenomenon associated with Islamic boarding schools, from the point of view of thoughts, perceptions, and beliefs attached to the subject. Through reflective logic, the empirical evidence of Islamic boarding schools is abstracted rationally in the logic of induction and described in a systemic-comprehensive manner in the logic of deduction.

Steps to renew pesantren can be done by granting formal legality in the form of diplomas, adjusting the curriculum by adding compulsory subjects, and expertise training programs. Islamic boarding schools as a miniature of society have a role in creating the unity and stability of community harmony. Islam Nusantara as a product of Islamic boarding schools has been able to stem the disruption of Islamic religious traditions. The concept of Tabarukkan and simplicity in Islamic boarding schools can produce young generations who are resilient in dealing with difficult problems in the era of disruption.

Keywords:

Education Disruption, Islamic Boarding School Dynamics

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Akhir-akhir ini fenomena krisis moral telah melanda bangsa ini, dengan ditemukan banyak kasus kenakalan remaja, KKN (Korupsi, kolusi, serta nepotisme) yang dikerjakan oleh sebagian oknum pemerintahan, bahkan tindakan amoral yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Banyaknya kasus dekadensi moral tersebut menjadi keprihatinan bersama. Padahal mereka yang melakukan tindakan yang tidak terpuji ini, berasal dari kalangan berpendidikan. Namun pendidikan yang mereka peroleh selama ini tidak menyoroti pada internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan kepribadian yang luhur.

Kenyataan tersebut sesuai dalam pandangan Dr. Soetomo bahwa Pendidikan Barat (umum) hanya terfokus menyiapkan generasi muda bangsa agar dapat menjadi pegawai dan lebih mengutamakan substansi keilmuan. Pembelajaran Barat dinilai kurang memberikan perhatiannya terhadap budaya bangsa Indonesia.¹ Hal ini menjadi salah satu penyebab terhambatnya kemajuan bangsa.

Bangsa ini tidak mungkin menggapai kejayaannya, apabila basis tindakan masyarakatnya hanya bertumpu pada akal pikiran semata. Generasi muda yang menjadi pilar penyangga kehidupan berbangsa,

¹ Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Depag RI, 1996, hlm. 13.

membutuhkan pendidikan yang berorientasi pada *softskill* dalam membentuk kepribadian yang matang dalam menghadapi dinamika zaman.

Sikap skeptis masyarakat terhadap pendidikan Islam harus dihilangkan. Paradigma berpikir masyarakat hendaknya diubah yang semula hanya berpikir untuk menyekolahkan di lembaga pendidikan formal, dapat memilih alternatif pendidikan pesantren. Bagi lembaga pendidikan pesantren diharapkan dapat berbenah diri dalam merespon keinginan masyarakat, terutama mampu beradaptasi terhadap dinamika kehidupan akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Melalui uraian tulisan ini, penulis berusaha mengemukakan tantangan dan peluang pesantren dalam menyikapi problematika disrupsi di dunia pendidikan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah memotret keberadaan disrupsi sebagai sebuah fenomena yang dikaitkan dengan pesantren, dalam sudut pandang pemikiran, persepsi, dan keyakinan yang melekat pada subyek tersebut. Pendekatan berpikir reflektif juga digunakan dalam penelitian ini dengan berpikir secara induktif dan deduktif. Data empirik diperlukan dalam berpikir induksi untuk dibuatkan abstraksi, dan uraian secara sistemik-komprehensif diperlukan dalam berpikir secara deduktif.²

Data tentang pesantren dijadikan bukti empirik untuk selanjutnya dianalisis dan dijabarkan secara rasional, sistemik dan komprehensif agar memperoleh kajian yang berkualitas. Metode analitis kritis dengan menguraikan dan memberi tanggapan terhadap fakta yang ditemukan, dan menginterpretasikan dari berbagai pendapat yang ada.

METODE/METHOD

Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini ditujukan untuk memotret keberadaan disrupsi sebagai sebuah fenomena yang dikaitkan dengan pesantren, dalam sudut pandang pemikiran, persepsi, dan keyakinan yang melekat pada subyek tersebut. Melalui logika reflektif, bukti empirik pesantren diabstraksikan secara rasional dalam logika induksi dan diuraikan secara sistemik-komprehensif dalam logika deduksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Pondok/pesantren bisa didefinisikan sebagai suatu lembaga Islam non modern yang didirikan dengan tujuan menjadikan orang-orang didalamnya dapat paham, merasakan, dan meimplementasikan segala aturan Islam dengan berpedoman pada nilai-nilai keIslaman untuk menjalai kehidupan berperadapan.³ Komitmen pesantren pada agama dimanifestasikan dalam wujud ilmu dan ketakwaan.⁴

² Lihat: Noeng Moehajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Raje Sarasin 1990, hlm. 6-17

³ Mastuhu, *Dinamika ...*, hlm. 6

Lembaga yang sudah lama mengakar dengan tradisi rakyat Indonesia, konsisten dalam pengajaran dan pengembangan nilai-nilai Islam. Islam mempunyai konsep kepercayaan, etika, prinsip, nilai yang wajib dipercaya dan diimplementasikan oleh pemeluknya secara terus menerus. Aspek nilai Islam dipesantren pada dasarnya dikelompokkan dalam 3 bentuk, yakni; nilai akidah, ibadah, serta akhlak.

Dr. K.H. Ahmad mengatakan bahwa, pesantren memiliki tujuan yang sempit serta luas. Dalam lingkup makro, pesantren bertujuan untuk menjadikan pribadi setiap orang memiliki spiritual dan intelektual yang bagus, meningkatkan ketaatan yang mendalam kepada Tuhan. Adapun tujuan makro dari pesantren yaitu, untuk membentuk setiap individu yang memiliki sikap tanggung jawab dalam memegang peran pengembangan Islam, mensejahterahkan masyarakat sehingga terciptanya kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat.⁵

Mulanya, para pendiri pondok mendirikan pondok-pesantren dengan tujuan sebagai pangkal edukasi nilai-nilai Islam yang dapat menghadirkan individu yang berintelektual, spiritual, sehingga dapat membagikan/memberikan ilmu yang ia miliki kepada umat (*intisyar al-‘ulum*). Hakekatnya, pondok dapat disebut sebagai pusat penghasil ulama yang nantinya bisa mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Disamping itu, pondok pesantren pula mempunyai tujuan dalam pembentukan karakter peserta didik agar memiliki kepribadian yang luhur dan memiliki karakter tangguh. Peran pesantren dalam pembentukan kepribadian, bukan sekadar pengakuan dari anggota pesantren, namun hal tersebut diakui oleh hampir seluruh masyarakat termasuk para alumni pondok. Dr. Soetomo, mengatakan bahwa, pondok-pesantren berperan penuh dalam pembentukan karakter para santri. Nilai, etika, prinsip ke-Islaman ditanamkan melalui tindak tutur figur kyai.

Secara historis, pesantren telah mengalami perjalanan panjang sampai dengan bentuknya yang seperti sekarang ini. Pada masa kolonial, pesantren dapat bertahan meskipun menghadapi banyak tekanan. Begitu juga pasca proklamasi kemerdekaan, pesantren tetap *survive* sebagai alternatif lembaga pendidikan yang melestarikan ajaran Islam, meskipun hadinya pengembangan tatanan pendidikan umum serta sekolah non tradisional. Respons pesantren terhadap disrupsi pendidikan membentuk adanya tipologi pesantren, sejatinya dapat dikelompokkan kedalam 3 jenis, yaitu; pesantren-*salaf*, *kehalaf*, serta penggabungan antara *salaf-kehalaf*.

Pada saat ini, semua orang di seluruh dunia tengah dihadapkan pada masa disrupsi. Dalam KBBI, *disruption* memiliki arti; hal tercabut dari akarnya.⁶ Disrupsi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang sedang terjadi perubahan secara fundamental, yakni adanya perkembangan teknologi yang mengakibatkan perubahan yang signifikan di peradaban. *Digitalisation* merupakan dampak yang ditimbulkan dari kemajuan *technology* yang merubah sebagian besar tataran kehidupan, seperti; sosial,

⁴ M. Sobry Sutikno, *Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Menuju Lembaga Pendidikan yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami)*, Lombok: Holistica, 2012, hlm.187

⁵ KH. A. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*. Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1991, hlm. 182

⁶ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdiknas, 2008, hlm.306.

ekonomi, dan pendidikan. Manusia memaknai disrupsi dalam perspektif yang beragam. Disrupsi dianggap sebagai sebuah ancaman oleh sebagian orang. Sebagian yang lain, menganggap kondisi tersebut sebagai sebuah peluang.

Era disrupsi menggeser ketergantungan akan tempat dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya, menjadi ketergantungan terhadap media. Banyak aktivitas manusia yang mulanya sebatas dapat dilaksanakan di kenyataan, namun sekarang dapat tergantikan di dunia maya. Bahkan dalam sebuah fenomena pandemi, dinamika tersebut menjadi keharusan. Adanya pelbagai perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi kemudian merambah dalam bidang pendidikan.

Beberapa keadaan yang berubah secara fundamental di era disrupsi dapat diuraikan ciri-cirinya sebagai berikut;

1. Penghematan biaya dengan kemudahan dalam bertransaksi yang dilakukan secara digital atau online.
2. *Output* produk barang atau jasa yang lebih berkualitas melalui peningkatan sarana dan prasarana.
3. Transparansi dan akuntabilitas pelayanan.
4. Kemudahan dalam mengakses suatu layanan.
5. Efektivitas, efisiensi, dan keakuratan dalam pelayanan.

Disadari atau tidak, disrupsi telah terjadi dalam sistem pendidikan yang berlangsung di Indonesia. Bahkan kebudayaan serta peradaban bumi makin berkembang dengan cepat, menjadi penyebab adanya inovasi pesantren. Kebudayaan yang serba empiris-rasional dari Barat, telah meniadakan nilai, norma, dan doktrin agama, karena menganggap aspek-aspek tersebut, menjadi penghambat kemajuan. Realitas ini menjadi tantangan berat dunia pesantren, khususnya dalam mengemban misi suci untuk melestarikan nilai-nilai mulia Islam dan budaya luhur bangsa ini. Dalam menghadapi masa sekarang, diperlukan generasi bangsa dengan kualitas unggul, kritis, cerdas, bisa berkomunikasi, dan penguasaan diri yang baik sehingga bisa berpikir secara terbuka, dan penguasaan terhadap teknologi modern. Kepribadian yang tangguh juga diperlukan dalam persaingan yang terbuka. Lembaga pendidikan memiliki kewajiban dalam menghadirkan, meimplementasikan seseorang dengan kemampuan yang mumpuni untuk menghadapi perkembangan dunia yang akan datang.⁷

Gagasan inovasi pondok pesantren, bukan berasal dari internal pondok yang murni ingin menghadirkan perubahan. Namun, pembaruan ponpes sebagai bentuk dari respons terhadap *modern education system* Belanda pada abad ke-19 dan gaya pendidikan Islam modern yang dimanage penganut faham reformis. Model pendidikan Islam kaim modern memiliki 2 tipe yaitu; *pertama*, sekolah umum model Belanda dengan diberikan tambahan materi atau pendidikan agama Islam. *Kedua*, madrasah modern yang secara terbatas mengambil beberapa model pendidikan Belanda dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam pelbagai hal bentuk Pendidikan modern Islam dinilai dapat

⁷ Zamroni, *Dinamika Peningkatan Mutu*, Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011, hlm.178

mengancam eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional.⁸ Namun kenyataannya, lembaga Pendidikan modern Islam mampu merangsang pesantren untuk melakukan perubahan. Ketika hal tersebut, pondok membentengi diri dari paham dan asumsi keagamaan kaum reformis. Tetapi, pesantren dalam batasan tertentu tetap melakukan pertimbangan untuk mengadopsi beberapa hal (kurikulum, perjenjangan dan model klasikal) kaum reformis. Sikap tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan (pondok), peserta didik dan pendidik.⁹

Meskipun seperti itu, pondok-pesantren selalu selektif dalam menentukan sikap (*cautious policy*); pondok memilih teliti, cermat, dan tidak terburu-buru untuk merealisasikan model *traditional education* ke *Modern Islamic Education* seperti yang dianut oleh paham reformis.¹⁰ Sikap tersebut dilatar belakangi oleh kaidah sebagai berikut:

المَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: "Melestarikan tradisi lama yang baik serta mengadopsi tradisi baru yang lebih baik".

Dari kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa demi menjaga adat atau kebiasaan lama yang baik dapat dipertahankan dan tetap diyakini. Meskipun para pesantren tengah melaksanakan pembaharuan, akan tetapi metode *bandhongan* dan *sorogan* selalu dipertahankan. Pembaharuan pesantren kemudian melahirkan tipologi pendidikan pesantren yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut Zamakhsyari Dhofier, demi mempertahankan tradisi pondok para kiyai bahu membahu untuk mencapainya. Dalam membangun solidaritas dan pengelolaan pesantren terdapat 3 cara yang dilakukan oleh para kiyai yaitu; tetap menjaga tradisi "sistem kepemimpinan pesantren dimiliki oleh keluarga (*ndalem*)", pengembangan dan perluasan jaringan pondok dilakukan dengan cara perkawinan sesama keluarga *ndalem*. Mempertahankan kebiasaan penyebaran ilmu pengetahuan diantara keluarga ulama/kiya pesantren. Ketiganya dilaksanakan secara terus menerus oleh para kiyai.¹¹

Kepemimpinan pondok umumnya sentralistik dan bertumpu pada satu figur kiai. Seperti yang terjadi dalam kepemimpinan pesantren *Salaf*. Seorang kiai yang berjasa mendirikan pondok pesantren bersumber dari harta pribadi atau bantuan swadaya masyarakat, maka ia yang bertanggung-jawab penuh dalam kelangsungan pesantren. Posisi kiai sangat dominan dalam mengarahkan lembaga pendidikan tersebut sesuai yang diharapkan. Visi-misi pesantren tergantung pada paradigma berpikir seorang kiai. Usaha mengembangkan intelektual santri, relevan dengan ilmu/pengetahuan yang dimiliki kiyai. Ketergantungan akan sosok figur kiai bisa berdampak positif dan negatif bagi kelangsungan berdirinya pesantren. Pelimpahan kepemimpinan diberikan kepada putra kiai atau anggota keluarga terdekat. Doktrin bahwasanya yang pantas menjadi penerus tonggak estafet kepemimpinan berasal dari unsur

⁸ Azyumardi Azra, *Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan*, Jakarta: Paramadina, 2009, hlm. xiv

⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LkiS, 2004, hlm. 28-29.

¹⁰ Azyumardi Azra, *Pesantren...*, hlm. xvi

¹¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994, hlm. 106-107

keluarga, telah menjadi hal yang dimaklumi oleh masyarakat. Kepemimpinan yang sentralistik memunculkan tindakan kediktatoran yang mematikan potensi dan mengubur idealisme. Dampak negatif model kepemimpinan tersebut, pada akhirnya akan memaksakan adanya pengasuh pengganti yang tidak sejajar dari segi keilmuan dan kharismanya.

Kepercayaan masyarakat akan berkurang untuk menitipkan anaknya di pesantren tersebut bila dipaksakan adanya penerus kepemimpinan yang bukan ahlinya, sampai pada periode yang dianggap ada sosok pengganti yang dinilai pantas dari segi keilmuan dan kharismatik. Tidak sedikit fenomena ini dialami oleh pesantren Salaf, yang santrinya menurun secara drastis sepeninggalnya kiai *SePub*.¹² Tidak menutup kemungkinan, akan memunculkan pesaing baru dari orang yang dinilai 'alim (memiliki kedalaman ilmu agama) untuk mendirikan pesantren baru.

Alternatif permasalahan kepemimpinan pesantren tersebut, kepemimpinan melalui penunjukan oleh yayasan yang menaungi pesantren, seperti dalam bentuk pesantren *Khalaf*. Mekanisme organisasi dalam yayasan dapat memunculkan pemimpin pengganti dengan kriteria yang layak dalam mengemban visi-misi pesantren, seperti; 'alim, amanah, visioner, transformatif, dan sebagainya. Menurut Muhtadi Zainuddin dan Abdul Mustaqim, prinsip kepemimpinan yaitu menyelaraskan segala aspek organisasi baik tujuan, tugas, wewenang, maupun tanggung jawab sehingga tumpang tindih satu dengan yang lainnya.¹³

Dinamika zaman, menuntut adanya modernisasi pesantren sebagai bentuk adaptasi dengan keadaan. Pendigitalisasian kitab kuning penting untuk dijadikan sebagai kesempatan dalam mempermudah pengkajian kitab-kitab klasik agar lebih ringkas. Nantinya, peserta didik maupun pendidik dapat memiliki akses yang praktis dan mudah dalam mengkaji kitab. Dulu sebelum diperkenalkan adanya sistem beroperasikan Android di ponsel pintar, telah dikembangkan adanya *software* pada komputer seperti; Al-Qur'an Digital, Lidwa Pustaka Hadis, Maktabah Syamilah, dan sebagainya. Kehadiran smartphone mampu mengemas aplikasi tersebut dalam genggam tangan. Alumni pesantren sudah banyak yang mampu menggunakan aplikasi tersebut dalam berbagai keperluan. Bahkan sering dijumpai dalam *Babtsul Masa'il*, pesertanya menggunakan laptop atau *smartphone* dalam mencari rujukan sebagai argumentasi mereka dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Publikasi karya-karya kepesantrenan juga sudah banyak ditemui di internet sebagai media dakwah (*intisyar al-'ilmi*). Hal ini dapat menepis anggapan bahwa sumber daya masyarakat (SDM) pesantren rendah karena terlahir atas keinginan masyarakat, *dimanage* langsung oleh rakyat, serta bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Pesantren dengan SDM yang rendah sulit beradaptasi dengan perubahan sepanjang waktu.

¹² Masyarakat pesantren berkeyakinan bahwa semakin tua usia kiai, semakin dalam tingkat keilmuan agamanya dan keberkahan yang meliputi dirinya.

¹³ Muhtadi Zainuddin dan Abdul Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Telaah Normatif dan Historis)*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2005, hlm.9.

Pesantren harus dapat mencetak lulusan yang mampu bersaing dan memiliki prospek di dunia kerja. Paradigma pesantren tidak lagi sekedar menjadikan santri *tafaqquh fi ad-din* (menguasai ilmu agama secara mendalam), namun juga memiliki keterampilan hidup (*lifeskill*). *Output* pesantren dituntut dapat unggul dalam setiap bidang terutama aspek teknologi dan telekomunikasi.

Keterbukaan informasi menuntut penguasaan bahasa asing dalam menggali pengetahuan secara lebih luas. Kemajuan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan tidak terlepas dari adanya para cendekiawan Muslim yang mampu menguasai bahasa Ajam (non Arab) seperti; Persia dan ‘Ibrani, selain memiliki modal penguasaan Bahasa Arab. Kompetensi penguasaan bahasa Arab sudah menjadi keharusan dalam dunia pesantren. Mengingat bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan kedalam aturan, hukum Islam, yaitu *Al-Qur’anul karim & As-sunnah*. Konteks sekarang kemahiran berbahasa Inggris mutlak dibutuhkan. *English language* adalah bahasa komunikasi Internasional. Respons kebutuhan akan penguasaan bahasa asing sudah diwujudkan oleh pesantren modern dan pesantren yang mengadopsi pendidikan madrasah.

Pesantren tidak boleh menjadi pendidikan yang kontradiktif dengan pendidikan umum. Semangat dalam mempelajari berbagai bidang keilmuan harus digalakan dalam dunia pesantren. Dualisme keilmuan seharusnya sudah tidak ada lagi, bila kita mencermati pernyataan berikut ini;

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Artinya: “Barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengharapkan (kebahagiaan) akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunianakhirat, maka hendaknya dengan ilmu.”¹⁴

Standarisasi pendidikan yang membutuhkan pengakuan legal formal melalui ijazah merupakan kebutuhan yang mendasar pada saat ini. Dokumen pernyataan kelulusan ini dibutuhkan sebagai syarat untuk dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau melamar pekerjaan. Terlebih adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang mengakui legalitas ijazah lulusan pesantren.¹⁵ Hal ini menjadi penanda pembaharuan pesantren yang semula tanda kelulusan berupa “*ijazab*” dimaknai sebagai doa dan pengakuan dari kiai atas kelayakan santri dalam menyebarkan keilmuannya.¹⁶

Dengan adanya aturan penyetaraan di atas, pesantren dapat beradaptasi dengan mengadopsi kurikulum pendidikan formal. Pembaharuan pesantren telah diadakan sejak tahun 1958 Masehi, lembaga pendidikan ini mendirikan Madrasah Wajib Belajar (MWB).¹⁷ Usaha ini dilakukan sebagai langkah adaptif untuk menyukseskan kewajiban belajar dilingkungan asramah. Pengakuan pesantren secara yuridis melalui penerbitan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 perihal *education system*,

¹⁴ Ahmad bin al-Husain Al-Baihaqi, *Manaqib asy-Syafi’I*, Kairo: Maktabah Dar at-Turats, t.th., Juz 2, hlm.139

¹⁵ Lihat : Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1973 Bab 1 Pasal 1.

¹⁶ Mastuki HS. dkk., *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2003, hlm. 89.

¹⁷ Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Jakarta : Mizan, 1999, hlm. 17

menguatkan pesantren menjadi pendidikan keagamaan yang dikelompokkan dalam lajur pembelajaran sekolah.¹⁸ Usaha-usaha tersebut semakin memudahkan pesantren untuk beraktualisasi secara maksimal. Prioritas saat ini, sejauhmana pengelola pesantren mampu bersaing untuk memberikan kualitas yang setara, bahkan melebihi pendidikan umum.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mandiri, biaya operasionalnya bersumber dari pendanaan pribadi atau bantuan swadaya masyarakat. Hal inilah menjadi alasan terbatasnya anggaran keuangan dalam pengelolaan lembaga pesantren. Beruntung dari doktrin yang sudah tertanam, para ustad memiliki dedikasi tinggi dan keikhlasan dalam mengajar dengan gaji yang sedikit. Pesantren berupaya untuk menghindarkan dirinya dari komersialisme pendidikan. Alasan yang mendasar adalah biaya pendidikan yang mahal masih dirasa memberatkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Perlakuan pesantren juga tidak diskriminatif terhadap para santri.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang humanis dalam menerima berbagai lapisan masyarakat, bahkan bagi mereka yang termarginalkan. Dalam beberapa fenomena, dijumpai bentuk pesantren yang tidak lazim, seperti; pesantren mantan narapidana, pesantren mantan pecandu Narkoba, pesantren Tuna susila, dan pesantren Waria. Kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap sebagai aib masyarakat itu, ditampung untuk mendapatkan pendidikan Islami agar menjadi manusia yang bermartabat. Tiada kata terlewat bagi orang yang memiliki keinginan lebih baik. Pesantren sadar akan perannya dalam menerapkan konsep ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Permasalahan di lembaga pesantren bukan berasal dari tenaga pendidiknya, namun berkaitan dengan sarana-prasarana. Terkadang bangunan fisik pesantren jauh dari kata layak, ketika masyarakat sekitar tidak memiliki kepedulian terhadap pesantren. Kebanyakan kiai tidak mau memberatkan santrinya dengan menarik uang sumbangan gedung. Hal ini dapat dimaklumi, karena umumnya santri yang mondok berlatarbelakang keluarga menengah ke bawah. Stigma negatif yang masih terbangun di benak masyarakat Indonesia, bahwa anak-anak yang pandai berhak mendapatkan pendidikan yang layak di lembaga pendidikan negeri atau swasta unggulan, sementara mereka yang tingkat kecerdasannya pas-pasan dititipkan di pondok pesantren.

Perspektif negatif bahwa pesantren penyebab kemunduran bangsa masih banyak dijumpai dari kalangan masyarakat. Keilmuan agama yang menjadi orientasi lembaga pendidikan yang paling tua ini, dianggap tidak relevan dengan kemajuan zaman. Masyarakat umumnya memandang pendidikan vokasi yang dibutuhkan dalam dunia persaingan usaha.

Perilaku amoral yang merajarela, menjadi sebab dibutuhkan sebuah pendidikan yang mengedepankan *softskill*. Sehingga dapat terlahir para tokoh penguasa Negara yang bukan sekadar memiliki kecerdasan intelektual, namun memiliki kepribadian yang unggul. Internalisasi nilai-nilai

¹⁸ Lihat : Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan, Bab 1 Pasal 11 Ayat 6.

kepesantrenan dan pembentukan karakter Islami melalui nilai-nilai tersebut merupakan solusi dekadensi moral di masyarakat. Pendidikan humanis yang tercermin dari pesantren sebagai wujud mengembangkan potensi manusia seutuhnya. Bilamana pesantren dianggap sebagai penjara suci, maka pengaruh demoralisasi pergaulan di luar pesantren dapat dibendung dengan adanya pengasramaan. Aturan pesantren juga mencegah adanya pergaulan antara laki-laki dan perempuan (*ikhtilath baina ar-rijal wa an-nisa'*) sebagai upaya untuk mencegah hubungan terlarang seperti pacaran yang menjurus ke perzinahan. Digitalisasi memicu seseorang bebas dalam mengakses segala sesuatu tanpa adanya batas ruang dan waktu. Tanpa kontrol keluarga, anak remaja mudah mengakses tayangan pornografi dan kekerasan.

Pesantren merupakan manifestasi budaya atau adat negara. Nurcholish Madjid mengatakan bahwa pesantren adalah instansi pendidikan “*indigenous*” product kebudayaan bangsa Indonesia. Mula-mula lembaga pendidikan yang sudah ada pada masa kerajaan Hindu-Buda berbentuk perguruan atau padepokan. Dengan masuknya agama Islam di Indonesia, lembaga tersebut mengalami pengembangan dan pengislaman.¹⁹ Tokoh yang dinilai telah berhasil mengemban *pesantren education system* ialah Bong Swi Hoo atau *masyhur* dengan nama “Sunan Ampel”. Berkaitan pada sistem pengelolaan pondok pesantren beserta korelasi perubahan-sosial, Identitas budaya Islam Indonesia tercermin dalam budaya yang ada di pesantren. Budaya keislaman yang berkembang di pesantren merupakan bentuk corak Islam yang khas dari Indonesia. Ideologi pesantren merupakan basis ketahanan sosial-budaya dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Internalisasi nilai di pesantren menggabungkan berbagai pendekatan. Salah satunya pendekatan *riyadlah*. Sebuah bentuk latihan rohani yang ditujukan untuk menghambat atau memerangi keinginan-keinginan hawa nafsu. Implementasi *riyadlah* ini dilakukan melalui intensitas ibadah puasa, wirid, dan sebagainya.

Tidak semua pesantren memiliki asrama tertutup yang mampu membentengi pengaruh-pengaruh dunia luar layaknya penjara. Melalui rutinitas dan aktivitas yang padat, santri dengan sendirinya sibuk dengan kegiatan seperti mengaji, menghafal, *ro'an* (piket kebersihan) di pesantren dan tidak berupaya mencari kesenangan di luar pesantren.

Pesantren dapat dengan mudah beradaptasi, berasimilasi, dan juga berinkulturasi terhadap kebudayaan lokal.²⁰ Pesantren tidak mempertentangkan kebudayaan lokal yang melebur dalam budaya Islam Nusantara dengan memberi label “*bid'ah*”. Masyarakat Indonesia menerima dengan baik keberadaan pesantren. Bahkan ketika ada pihak yang menghancurkan ajaran Islam dan penganutnya, maka Islam Nusantara yang tetap mampu mempertahankan eksistensinya. Aliran Wahabisme,

¹⁹Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997, hlm. 3

²⁰ Paisun, “Dinamika Islam Kultural (Studi atas Dialektika Islam dan Budaya Lokal)” dalam Kumpulan Makalah yang Dipresentasikan pada *The 10th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS ke-10) di Banjarmasin 1-4 November 2010*, Jilid 1, hlm. 223.

radikalisme, liberalisme, penganut sistem *kbilafab* yang semakin masif menghancurkan ajaran Islam di berbagai wilayah di dunia, namun hal tersebut tidak berlaku di Indonesia. Islam Nusantara yang merupakan corak Islam di Indonesia memegang teguh konsep *Wasathiyah*. (moderasi dalam beragama) yang bersumber dari ajaran *Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah*.²¹ Bermodalkan budaya ketimuran yang mengedepankan keramahan dalam bersikap, pesantren dapat dengan mudah menginternalisasikan nilai-nilai luhur ajaran Islam.

Pesantren merupakan lembaga yang punya kontribusi besar dalam memecahkan permasalahan umat. Tradisi musyawarah yang merupakan tradisi kerukunan masyarakat Indonesia ditanamkan kepada santri saat menempuh pendidikan di pesantren. Permasalahan yang muncul atau ditemui di tengah-tengah masyarakat yang belum ditemukan jawabannya, dibahas bersama merujuk pada literatur yang ditulis oleh para ulama *Salaf*. Aktivitas penetapan hukum ini dirumuskan dengan bertaqlid untuk mengaktualisasikan sebuah hukum yang *dinash* Al-Qur'an dan as-Sunnah.²² Selain mempererat solidaritas antar santri, komunitas *Babsul Masa'il* merupakan langkah untuk membendung merebaknya fatwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Budaya keilmuan ini merupakan bentuk kepedulian kaum pesantren dalam tanggung-jawabnya sebagai *ahl al-'ilmi* (menguasai ilmu).

Kehidupan bermasyarakat pasti memiliki tokoh yang dimuliakan, *qudwah* (panutan), serta dijadikan rujukan untuk memecahkan permasalahan. Figur adalah elemen terpenting dalam menggerakkan segala kegiatan. Tidak terbantahkan, masyarakat menghormati kiai sebagai sosok yang patut dimuliakan dan dilindungi. Terutama bagi kiai yang ber-*hidmah* (mengabdikan) dirinya bagi kepentingan masyarakat secara ikhlas dan tidak ikut terlibat dalam dunia politik. Nasehatnya menjadi solusi permasalahan umat, dan tidak jarang ikut mengkritisi kebijakan pemerintah yang melenceng dari koridor keagamaan (*Kiai Tutur*). Namun sebaliknya, bilamana figur tokoh agama tersebut dipandang sebagai *Kiai Catur* (terlibat dalam pemerintahan), maka rasa simpati masyarakat akan berkurang terhadapnya. Dalam dunia sosial kemasyarakatan, figur kiai berperan penting sebagai *role model* (*uswah hasanah*) bagi para santri dan masyarakat. Kiai memiliki wibawa kultural yang kuat dalam mengokohkan kekuatan sipil dalam proses perubahan sosial yang terus berlangsung dalam sejarah peradaban. Keteladanan kiai yang dapat diterima masyarakat, lahir dari hati nurani tanpa kepentingan politik.

Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi seorang kiai untuk berusaha mengimplementasikan pola hidup yang islami dan etika pergaulan yang menjunjung tinggi *Sunnah Rasul*. Artinya, pola kehidupan seorang kiai menjadi percontohan santri dalam membentuk kepribadiannya. Transfer *knowledge* dari seorang kiai menjadi doktrin yang tidak terbantahkan oleh santri. Semakin dalam tingkat pengetahuan kiai dan luas wawasannya, semakin banyak pengetahuan yang diperoleh oleh santri. Keikhlasan ber-

²¹ Lihat: Ali Muhammad as-Shalabi, *Al-Wasathiyah fi al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Muassasah li Nasyr wa Tauzi wa at-Tarjamah, 2007, hlm.16-25.

²² A. Aziz Masyhuri, *Keagamaan Hasil Muktamar dan Munass Ulama NU Kesatu 1926 s.d ke-29 1994*, Surabaya: Dinamika Press, 1997, hlm. 364.

hidmah (melayani) masyarakat merupakan ruh untuk membangkitkan etos kerja dalam *transfer of value*. Konsep *Tabarukkan* dan kesederhanaan di pesantren dapat mencetak generasi muda yang tangguh dalam menghadapi permasalahan sulit di era disrupsi. Terlebih di era modern ini, tuntutan pekerjaan menjadi penyebab krisis perhatian keluarga. Dalam wadah pesantren membangkitkan hubungan sosial yang mulai luntur di keluarga. Peran Kiai dan Ibu Nyai identik dengan sosok ayah dan ibu dalam keluarga. Teman-teman *se-gota'an* (ruang kamar asrama) yang terjalin interaksi secara intensif menumbuhkan sikap persaudaraan yang erat layaknya hubungan persaudaraan antara anggota keluarga.

Tidak dipungkiri lembaga pesantren memiliki andil dalam menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Secara historis, pesantren memberikan kontribusi penting dalam menumbuhkan semangat patriotisme dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Komando "*jihad*" yang disyiarkan KH. Hasyim-Asy'ari mampu menggerakkan para santri untuk berjuang dalam pertempuran 10 hari di Surabaya. Lagu perjuangan karya KH. Wahab Hasbullah yang berjudul "*Ya Lal Wathon*" dianggap menjadi pemantik semangat perjuangan para santri melawan penjajah. Tokoh-dari kalangan pesantren seperti KH. Wahid Hasyim, juga turut berjasa dalam perumusan dasar Negara.

Pesantren tidak menutup diri dengan perubahan. Terbukti banyak pesantren yang membekali generasi mudanya dengan *life skill*. Pada dasawarsa 1970-an, pemberian bekal ketrampilan ekonomi telah dilakukan oleh banyak pesantren kepada para santrinya. Bahkan masyarakat sekitar turut mendapatkan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pesantren.²³ Belakangan ini, *support* pemerintah terhadap pesantren dilakukan dengan penyediaan sarana-prasarana yang berbentuk Balai Latihan Kerja (BLK) Pesantren, yang meliputi berbagai keahlian, seperti; keterampilan komputer, menjahit, las listrik, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar generasi muda yang tercetak dari pesantren selain memiliki pengetahuan dan kepribadian Islami, juga mampu menjadi *entrepreneur* yang mandiri.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Pesantren memiliki komitmen pada agama Islam yang termanifestasikan dalam wujud ilmu dan ketakwaan. Pesantren merupakan wujud keaslian budaya keagamaan di Indonesia. Eksistensi pesantren diwujudkan dalam inkulturasi melalui langkah akomodatif dan adaptif sebagai respons terjadinya disrupsi di dunia pendidikan.

Perubahan pesantren yang dinilai lambat disebabkan adanya sikap kehati-hatian lembaga ini agar identitas pesantren tetap terjaga. Eksistensi pesantren dalam menghadapi dinamika zaman melahirkan adanya pembaharuan dalam kurikulum atau model pendidikan yang dapat dijumpai pada model pesantren *Khalaf* dan pesantren yang mengadopsi sistem madrasah. Langkah alternatif dalam mengatasi kelemahan kepemimpinan pesantren yang sentralistik adalah penunjukan pengasuh dari yayasan yang

²³ Masykuri Abdillah, "Pesantren Dalam Konteks Pendidikan Nasional dan Pengembangan Masyarakat", dalam *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta : Grasindo, 2002, hlm. 408.

menaungi pesantren. Meskipun pesantren harus menerima perubahan, namun budaya religius pesantren harus dipertahankan.

Langkah pembaharuan pesantren dapat dilakukan dengan pemberian legalitas formal dalam bentuk ijazah, penyesuaian kurikulum dengan penambahan mata pelajaran wajib, dan program pelatihan keahlian. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang humanis dalam menerima berbagai golongan tanpa diskriminatif sebagai bentuk representasi dari Islam *rahmatan lil 'alamin*. Pesantren sebagai miniatur masyarakat memiliki peran dalam menciptakan persatuan dan stabilitas kerukunan masyarakat. Islam Nusantara sebagai produk masyarakat pesantren telah mampu membendung disrupsi aliran agama Islam. Konsep *Tabarukkan* dan kesederhanaan di pesantren dapat mencetak generasi muda yang tangguh dalam menghadapi permasalahan sulit di era disrupsi. Pesantren juga mempersiapkan lulusannya agar memiliki keterampilan kerja untuk hidup mandiri.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

- A. Aziz Masyhuri, *Keagamaan Hasil Muktamar dan Munass Ulama NU Kesatu 1926 s.d ke-29 1994*, Surabaya: Dinamika Press, 1997.
- Ahmad bin al-Husain Al-Baihaqi, *Manaqib asy-Syafi'I*, Kairo: Maktabah Dar at-Turats, t.th., Juz 2.
- Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Ali Muhammad as-Shalabi, *Al-Wasatiyyah fi al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Muassasah li Nasyr wa Tauzi wa at-Tarjamah, 2007.
- Azyumardi Azra, *Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan*, Jakarta: Paramadina, 2009
- KH. A. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*. Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1991.
- M. Sobry Sutikno, *Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami)*, Lombok: Holistica, 2012.
- Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Jakarta : Mizan, 1999.
- Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Depag RI, 1996.
- Mastuki HS. dkk., *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2003.
- Masykuri Abdillah, "Pesantren Dalam Konteks Pendidikan Nasional dan Pengembangan Masyarakat", dalam *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta : Grasindo, 2002.
- Muhtadi Zainuddin dan Abdul Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Telaah Normatif dan Historis*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2005.
- Noeng Moehajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* , Yogyakarta: Raje Sarasin 1990.
- Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Paisun, "Dinamika Islam Kultural (Studi atas Dialektika Islam dan Budaya Lokal)" dalam Kumpulan Makalah yang Dipresentasikan pada *The 10th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS ke-10) di Banjarmasin 1-4 November 2010*, Jilid 1.

Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdiknas, 2008.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1973 Bab 1 Pasal 1.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan, Bab 1 Pasal 11 Ayat 6.

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994.

Zamroni, *Dinamika Peningkatan Mutu*, Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011.